



Peran dan Pentingnya Komunikasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan

Nadila Savira ^{1*}, Indriani Indriani ², Deandra Almaz Zahra Nasution ³, Aisyah Putri ⁴,
Rayhan Irwanda ⁵

¹⁻⁵ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis : nadilasavira0211@gmail.com *

Abstract. *The aim of this research is to determine the role and importance of communication in implementing the smoke-free area policy in the city of Medan. National research is descriptive research, data collection techniques are carried out by reviewing the literature through collecting secondary data from relevant scientific and international journals. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that communication in implementing the smoke-free area policy in the city of Medan has been implemented through outreach efforts or using the media, but has not worked optimally. Communication is an important aspect and indicator in the success of a public policy. Communication plays a very important role in disseminating policies and information, transmitting information, creating partnerships between policy makers and the public, gaining public support, expanding information, maintaining information ethics so as to avoid distorted information. and expanding coordination. Communication also plays a very important role in policy because it helps policy implementers know what must be done, explains the responsibilities and rights of the community so that it encourages the community to implement the smoke-free area policy in the city of Medan.*

Keywords: *Communication, Medan City, Non-Smoking Area, Role*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan pentingnya komunikasi dalam implemementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. Data di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan telah dilaksanakan melalui upaya sosialisasi atau menggunakan media, namun belum berjalan secara maksimal. Komunikasi merupakan aspek dan indikator terpenting dalam keberhasilan sebuah kebijakan public, Komunikasi berperan sangat penting menyebarluaskan kebijakan dan informasi, transmisi informasi, , menciptakan kemitraan antara pembuat kebijakan pelaksana dan masyarakat, memperoleh dukungan masyarakat, memperluas informasi, menjaga etika informasi sehingga terhindar dari informasi yang menyimpang dan memperluas koordinasi. Komunikasi juga berperan sangat penting bagi kebijakan karena membantu pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan menjelaskan tanggung jawab serta hak masyarakat sehingga mendorong masyarakat mengimplemetasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan

Kata kunci: *Kawasan Tanpa Rokok, Komunikasi, Kota Medan, Peran*

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia menganggap perilaku merokok merupakan hal yang telah lama ada di tengah – tengah masyarakat dan bukan lagi hal aneh bahkan telah menjadi aktivitas yang dilakukan di Indonesia sejak usia muda dimana saja (Siregar, 2021). Kebiasaan merokok di berbagai tempat dan anggapan akan perilaku merokok menjadi hal yang wajar ditengah masyarakat di indonesia dan mudahnya akses terhadap produk rokok di Indonesia

menjadikan merokok menjadi masalah kesehatan di Indonesia hingga saat ini (Hasibuan & Ulfha, 2022).

Pada tahun 2017 berdasarkan data WHO jumlah perokok di Indonesia mencapai 35% dari jumlah populasi atau sebanyak 75 juta jiwa dan menjadikan negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi nomer 3 di dunia. Sementara itu Indonesia menjadi negara pertama sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di Asia tenggara dengan presentase sebesar 50,68% atau sebesar 121.156.804 jiwa. Selain itu Indonesia juga menjadi negara tertinggi penyumbang jumlah perokok anak di bawah umur 18 tahun dengan angka prevalensi mencapai 9,1 % atau 8 juta anak adalah perokok aktif (Sitindaon, 2022). Dan setiap keluarga yang memiliki keluarga perokok setidaknya menghabiskan 10% anggaran keuangan nya untuk membeli rokok karena menganggap rokok adalah sebuah kebutuhan dan kebiasaan yang harus terpenuhi sehari – harinya (Ibnu et al., 2019)

Kota Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 2,3 juta jiwa pada tahun 2018. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota nomor 3 terbesar di Indonesia (Nasution et al., 2022). Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi provinsi dengan jumlah perokok tinggi di Indonesia menempati posisi ke 12 dari 33 provinsi di Indonesia. Merokok merupakan perilaku yang tidak sehat bagi lingkungan maupun manusia, hal ini karena asap yang dihasilkan oleh rokok mengandung banyak zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia lainnya (Khairatunnisa & Telaumbanua, 2021). Perilaku merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, berbagai masalah kesehatan saluran pernafasan hingga menyebabkan penyakit jantung, selain itu perilaku merokok juga secara signifikan mendatangkan dampak bagi perokok pasif yang menghirup asap rokok dari orang – orang yang merokok di sembarang tempat (Siregar, 2021).

Berdasarkan data, perilaku merokok setidaknya menyebabkan 225.720 kasus kematian di Indonesia setiap tahun nya, namun justru angka perokok muda Indonesia terus mengalami peningkatan (Widati et al., 2022). Bahkan asap rokok telah menjadi salah satu penyebab terbesar kematian di Indonesia karena perilaku merokok disembarang tempat seperti di tempat – tempat umum seperti restoran, di halte, dan angkutan umum yang dianggap lazim di Indonesia yang menyebabkan bahkan bukan perokok aktif bisa mengalami dampak negatif masalah kesehatan hingga meninggal dunia karena terpapar asap rokok (Sitindaon, 2022).

Meskipun kampanye anti rokok telah dilakukan dan dampak akibat dari merokok juga sudah diketahui oleh banyak orang termasuk perokok itu sendiri, namun pada umumnya perokok memiliki keinginan yang rendah untuk berhenti merokok karena telah menganggap rokok sebagai kebutuhan dan terus melakukan aktivitas merokok di sembarang tempat (Ibnu et al., 2019). Oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif penggunaan rokok terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia berintegrasi dengan pemerintah daerah merumuskan serta menerbitkan peraturan terkait kawasan tanpa rokok melalui UU 36 tahun 2009 dan Permen 109 tahun 2012 (Widati et al., 2022).

Berdasarkan UU Nomer 36 tahun 2009 yang mengatur tentang diberlakukannya upaya mengurangi dampak negatif rokok bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan ditetapkan nya kawasan tanpa asap rokok, dalam UU tersebut pula pada pasal 115 ayat 2 dijelaskan bahwa diwajibkan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di daerah (Hasibuan & Ulfha, 2022). Kawasan tanpa asap rokok atau KTR merupakan salah satu upaya yang dicanangkan pemerintah Indonesia dan harus dilaksanakan oleh seluruh kawasan di daerah di seluruh Indonesia untuk mengurangi asap rokok yang dapat menyebabkan kerugian kesehatan bagi masyarakat, yang memiliki tujuan mewujudkan ruang serta lingkungan bersih dan sehat, terwujudnya perlindungan dari bahaya rokok terhadap masyarakat. bertambahnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih teratur dan sehat. Berbagai macam tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum (Nurfadilla, 2022).

Salah satu daerah yang menerapkan kawasan bebas asap rokok atau kawasan tanpa rokok KTR adalah Medan Sumatera utara. Dalam implementasinya penegakan kawasan bebas asap rokok di kota meda diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 (Siregar, 2021). Namun implementasi KTR di kota medan masih belum memiliki komitmen yang kuat, dan komunikasi terkait kawasan tanpa rokok di kota medan masih belum dilakukan secara maksimal, beberapa masyarakat di kota medan masih belum mengetahui telah diterapkan kebijakan publik tersebut (Siregar, 2021).

Meskipun tempat sekolah menjadi salah satu kawasan tanpa rokok namun faktanya tidak ada sama sekali bentuk komunikasi atau sosialisasi oleh pemerintah kota medan terkait kebijakan publik kawasan tanpa asap rokok di kota medan pada sekolah - sekolah (br.Barus et al., 2024). Implementasinya masih jauh dari harapan, dikota medan hanya sedikit tempat yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok atau SFP. Hal itu diasumsikan bahwa

penegakan hukum dalam melaksanakan Peraturan Kota Medan Nomor 34 Tahun 2014 tentang kebijakan bebas rokok masih belum diterapkan dengan optimal hingga lemahnya kebijakan kawasan bebas rokok di kota Medan, penegakan hukum yang tidak berjalan karena kurangnya petugas di lapangan dan minimnya anggaran sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi pada masyarakat terkait implementasi kawasan bebas rokok di kota Medan menjadi alasan utama lemahnya implementasi kebijakan bebas rokok (SFP) di Kota Medan (Siregar, 2023)

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi seseorang dan perilakunya adalah komunikasi. Komunikasi utamanya yang bersifat persuasi dapat bersifat mempengaruhi komunikasi yang hendak dipengaruhi oleh karena komunikasi yang sangat baik sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi publik melaksanakan kebijakan tersebut (Septiana, 2022);(Pramana Putra & Setyowati, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk kebijakan ialah serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan publik maka sangat perlu melewati beberapa tahapan kebijakan publik itu sendiri diantaranya tahapan tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan (Utama & Saraswati, 2021)

Kebijakan publik juga dijelaskan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Dimana tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah. Sementara implementasi sebagai salah satu tahapan kebijakan publik merupakan hal – hal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Menurut teori proses implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat indikator yaitu: a. Komunikasi, b. Sumber daya, c. Disposisi dan d. Struktur organisasi (Pramana Putra & Setyowati, 2022).

Kebijakan KTR yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan serta

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan merupakan salah satu kebijakan publik karena dibuat dan dirumuskan oleh pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang dibuat. Sebagai salah satu kebijakan publik maka salah satu tahap yang pasti ada dalam kebijakan tersebut adalah implemenetasi dimana dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh indikator – indikator yang salah satunya adalah komunikasi. Sehingga komunikasi sebagai salah satu indikator implementasi kebijakan public merupakan aspek yang memiliki peran penting dalam proses implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kota Medan.

Penelitian sebelumnya oleh Widati et al., (2022) menyatakan hasil penelitian bahwa komunikasi secara intensif memiliki peranan penting meningkatkan kesadaran pemerintah eksekutif dan legislative terkait pentingnya kawasan tanpa rokok dan akan meningkatkan keberhasilan implementasi kawasan tanpa rokok pada suatu daerah. Selain itu, penelitian oleh Sugiyo et al., (2022) dalam penelitian nya menyatakan jika komunikasi secara konprehensif memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan implementasi program kebijakan KTR dan berperan untuk mengumpulkan dukungan dari khalayak yang berorientasi pada kebijakan sehingga implementasi kebijakan KTR dapat berjalan dengan sukses pada suatu daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian mengklasifikasi, mendeskripsikan dan melakukan wawancara mendalam terhadap objek peneliti. Sedangkan tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus yang hadir ditengah konteks yang terbatas. Maksud dari penelitian ini mengumpulkan dan mendapatkan data yang mendalam secara langsung dari lokasi penelitian dan memberi gambaran jelas mengenai masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu telaah pustaka dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber putaka baik dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. Dan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implemenetasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Medan

Kebijakan kawasan tanpa asap rokok merupakan kebijakan pemerintah yang bekerja

sama dengan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang dapat merugikan lingkungan dan kesehatan. Secara menyeluruh implementasi kebijakan KTR di kota medan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kota medan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat serta bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan secara kolektif. Implementasi KTR di kota medan didasarkan pada peraturan pemerintah Indonesia yakni UU nomor 3 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok pada daerah masing – masing (Hasibuan & Ulfha, 2022). Penegakan KTR telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia, pemerintah daerah hingga masyarakat (Pungguh Eko Susanto, 2024). Termasuk pemerintah kota medan.

Implementasi kebijakan KTR di kota medan di mulai sejak tahun 2014 melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kota medan implementasi kawasan bebas rokok dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penyampaian informasi dan sosialisasi terkait KTR di kota medan, dan kebijakan bebas asap rokok SFP di kota medan, implementasi kebijakan publik terkait kawasan bebas asap rokok di kota medan juga dilakukan pemasangan stiker, baliho, papan iklan serta menyediakan area khusus merokok dilingkungan kantor atau tempat umum. Implementasi kawasan bebas rokok di kota medan di implementasikan di berbagai area dan fasilitas yang menjadi kawasan bebas asap rokok menurut peraturan perundangan, sehingga kawasan tanpa asap rokok di kota medan di implementasikan pada berbagai macam tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum (Nurfadilla, 2022).

Namun implementasi kawasan bebas asap rokok di kota medan masih belum optimal, komunikasi pemerintah kota medan masih belum optimal dalam implementasi KTR di kota medan yang dibuktikan dengan masih banyaknya para pimpinan fasilitas di kota medan yang masih belum menyadari bahwa fasilitasnya telah menjadi kawasan bebas tanpa asap rokok. Fakta juga menunjukkan bahwa sosialisasi kurang dilaksanakan oleh para pelaksana terhadap seluruh kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kota medan. Hal ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah kota medan dalam implementasi KTR di kota medan. Kurangnya komunikasi oleh pemerintah kota medan terkait implementasi kebijakan kawasan bebas asap rokok di kota medan menjadikan implementasi kebijakan publik ini belum mampu berjalan secara optimal. Hingga menyebabkan banyaknya pelanggaran pada implementasi kawasan tanpa rokok di kota medan diberbagai area seperti pusat perbelanjaan fasilitas umum, lembaga

pendidikan bahkan fasilitas pemerintah atau lembaga milik negara hingga swasta di kota medan (Siregar, 2023).

Peran dan Penting Nya Implemetasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Medan

Komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dari seseorang ke pihak orang lain yang melebihi hanya sekedar dari kata – kata yang digunakan namun juga terkait ekspresi wajah, intonasi dan sebagainya dalam usaha guna dapat saling memperoleh pengertian dan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses implemetasi sebuah kebijakan publik seperti kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kota medan (Khairatunnisa & Telaumbanua, 2021).

Dalam sebuah implementasi Menurut George C. Edward III komunikasi memiliki peranan sangat penting tidak hanya bagi implemetator namun juga bagi para pembuat kebijakan komunikasi memerankan peranan penting dalam menyebar luaskan informasi terkait kebijakan publik yang dibuat. Dalam kebijakan kawasan tanpa asap rokok pada pemerintah kota medan, komunikasi memainkan peran sebagai sarana penyampaian informasi terkait kawasan bebas rokok dari pemerintah kota medan selaku pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yakni petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok di kota medan untuk kemudian diteruskan kepada peserta kebijakan yakni masyarakat untuk menjalankan kebijakan tersebut dimana umumnya komunikasi dilakukan dengan cara dua arah melalui komunikasi berupa sosialisasi untuk memperoleh umpan balik.

Komunikasi juga berperan sebagai transmisi informasi penyampaian informasi kepada seluruh jajaran implementor, hingga kelompok sasaran atau masyarakat mengetahui dengan baik apa hak, tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan tersebut (Pramana Putra & Setyowati, 2022). Komunikasi berupa sosialisasi secara langsung terkait perda kawasan tanpa asap rokok juga akan berperan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaksana terkait maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuat (Hasibuan & Ulfha, 2022). Komunikasi terkait kebijakan public tentang implementasi KTR dapat dilakukan suatu pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi, pemasangan tanda KTR melakukan pertemuan dengan badan usaha yang masuk dalam KTR dan sebagainya (Hayati & Bambang Irawan, 2022)

Dalam implementasinya proses transmisi atau penyampaian informasi terkait kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penyampaian informasi dan sosialisasi terkait KTR di kota medan, hingga pemasangan stiker, baliho, papan iklan. Penyampaian informasi atau penyebaran informasi yang dimaksud adalah penyebaran

informasi tentang kebijakan publik terkait KTR (Fariz Kahendra et al., 2023).

Secara lebih lanjut komunikasi dalam sebuah kebijakan publik seperti kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kota medan berperan sebagai sarana yang memberikan pemahaman kepada pelaku kebijakan terkait kawasan bebas rokok di kota medan serta komunikasi membantu menyelaraskan pemahaman antar satu pegawai atau pelaku kebijakan dengan pelaku kebijakan lainnya sehingga informasi yang saling tumpang tindih dapat dihindarkan selain itu komunikasi juga sangat penting karena komunikasi membantu pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan membangun kemitraan dengan masyarakat sehingga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan yang ada sehingga kebijakan akan dapat memperoleh dukungan yang maksimal dari masyarakat dan pelaksanaannya akan lebih efektif.

Komunikasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan publik karena kebijakan publik seperti kebijakan kawasan bebas asap rokok di kota medan akan menjadi lebih efektif implementasinya dan dapat terlaksana dengan baik jika pembuat serta pelaksana kebijakan mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan, dan pengetahuan ini hanya bisa diperoleh melalui kegiatan komunikasi operasional yang melibatkan atasan, bawahan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan publik tersebut (Nani, 2021). Dalam sebuah kebijakan publik komunikasi juga berperan untuk meningkatkan koordinasi, memperluas informasi dan pemenuhan sosial hingga berperan dalam pelaksanaan nilai – nilai etika untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan dalam implementasi kebijakan (Nani, 2021).

Mengingat sosialisasi sebagai bentuk komunikasi belum dilaksanakan dengan maksimal pada kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan yang menjadikan banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan kebijakan tersebut maka komunikasi memiliki peranan penting untuk menyampaikan informasi menyebarluaskan informasi dan meningkatkan minat masyarakat kota medan untuk mendukung kebijakan tersebut. Selain itu komunikasi juga membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaksana kebijakan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan sosialisasi petugas yang bertanggung jawab dalam implementasi kawasan tanpa rokok di kota medan, hingga meningkatkan kinerja mereka untuk lebih melakukan inspeksi, memberikan sanksi dan denda secara maksimal bagi masyarakat yang melanggar sehingga tujuan kebijakan untuk menjadikan medan sebagai kota dengan bebas rokok dapat terwujud. Tidak semua kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga komunikasi menjadi sangat penting dalam

penerapan kawasan tanpa rokok, hal ini karena nyatanya belum semua wilayah dan fasilitas di kota medan menerapkan KTR (Nuraeni et al., 2020)

Komunikasi memegang peranan penting menjadi indikator sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan karena dengan adanya komunikasi semua keputusan kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh jajaran baik pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat itu sendiri, komunikasi menjadi sangat penting dalam keberhasilan kebijakan publik mencapai tujuan karena komunikasi membantu implementor atau pelaksana kebijakan mengetahui tujuan atas kebijakan yang dilakukan dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk eksekusi kebijakan tersebut dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada sasaran sehingga tahapan eksekusi kebijakan lebih terarah, dan penyampaian kebijakan terhindar dari kesalahfahaman yang membuat masyarakat mengerti dan memiliki kepercayaan lebih atas kebijakan yang dilakukan tanpa adanya komunikasi kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan (Pramana Putra & Setyowati, 2022).

Komunikasi menjadi sangat penting bagi implementasi kawasan tanpa rokok di kota medan, karena dengan adanya kompetensi pelaku kebijakan dapat lebih memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri dan dapat menyusun langkah strategis atas eksekusi yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan karena pelaku kebijakan telah memahami apa yang harus dilakukan, komunikasi juga menjadi sangat penting karena dengan komunikasi informasi atas kebijakan tidak akan mengalami salah pengartian yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memikat masyarakat untuk mau menjalankan kebijakan tersebut. Komunikasi secara strategis dalam implementasi KTR di kota medan akan membantu terjangkaunya segmen kelompok kecil masyarakat dan akan mampu membuat perubahan yang signifikan pada populasi masyarakat. Hal ini karena komunikasi secara strategis dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk melakukan penetrasi ke kelompok – kelompok masyarakat kecil yang tidak terjangkau pada sosialisasi atas suatu kebijakan public, sehingga komunikasi membantu penyebaran informasi secara lebih luas pada populasi yang lebih besar dalam implementasi kebijakan KTR (Nurjanah & Rosilawati, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota medan telah dilaksanakan melalui upaya sosialisasi atau menggunakan media, namun belum berjalan secara maksimal, masih kurangnya komunikasi dan sosialisasi pemerintah kota medan ke masyarakat dan beberapa fasilitas yang menjadi kawasan tanpa rokok. Komunikasi

merupakan aspek dan indikator terpenting dalam keberhasilan sebuah kebijakan publik seperti kebijakan kawasan tanpa rokok. Komunikasi berperan menyebarluaskan kebijakan dan informasi secara menyeluruh ke berbagai pihak, komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi atau sebagai transmisi informasi kebijakan yang mampu menyampaikan secara akurat, tidak salah dan saling tumpang tindih sesuai dengan tujuan kebijakan, menciptakan kemitraan antara pembuat kebijakan pelaksana dan masyarakat, memperoleh dukungan masyarakat, memperluas informasi, menjaga etika informasi sehingga terhindar dari informasi yang menyimpang dan memperluas koordinasi. Komunikasi juga berperan sangat penting bagi kebijakan karena membantu pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan atas kebijakan tersebut dan tujuan tersebut, membantu masyarakat memperoleh pemahaman, mengetahui hak dan tanggung jawabnya atas kebijakan tersebut hingga meningkatkan minat masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut di kota Medan.

DAFTAR REFERENSI

- Barus, S. M., Juanita, & Zulfendri. (2024). Qualitative Study Of The Non-Smoking Areas Policy Implementation In Junior High Schools At Labuhan Batu Selatan Regency. *The International Journal Of Health, Education And Social*, 7(6).
- Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, & Farid Agusbyana. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review: Factors Affecting The Implementation Of Smoking-Free Area Policies : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(3), 430–435. <https://doi.org/10.56338/Mppki.V6i3.3284>
- Hasibuan, R., & Ulfha, R. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota Binjai. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.46774/Pptk.V5i1.475>
- Hayati, Z., & Bambang Irawan. (2022). Stakeholder Perceptions In A No Smoking Area Public Campaign In Bima City. *East Asian Journal Of Multidisciplinary Research*, 1(8), 1635–1640. <https://doi.org/10.55927/Eajmr.V1i8.1275>
- Ibnu, I. F., Nasir, S., & Saleh, U. (2019). Pengaruh Komunikasi Asertif Sebagai Dukungan Sosial Ibu Terhadap Intensi Merokok Ayah Didalam Rumah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 1(1). <https://doi.org/10.30597/Jkmm.V1i1.8691>
- Khairatunnisa, K., & Telaumbanua, I. P. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Sma Negeri 17 Medan. *Jumantik (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(3), 247. <https://doi.org/10.30829/Jumantik.V6i3.8918>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan Secara Merata (Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

- Gorontalo). Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 7(3), 231. <https://doi.org/10.32884/Ideas.V7i3.463>
- Nasution, F., Gurning, F., Siregar, P., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2022). Implementation Of The Smoke-Free Policy In Medan City, Indonesia: Compliance And Challenges. International Journal Of Preventive Medicine, 13(1), 30. https://doi.org/10.4103/Ijpvvm.Ijpvvm_106_20
- Nuraeni, Hadawiah, & Ahdan. (2020). Kebijakan Komunikasi Kepala Desa Dalam Membangun Kawasan Bebas Asap Rokok (Studi Pada Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). Jurnal Universitas Muslim Indonesia.
- Nurfadilla, R. D. (2022). Implementasi Ktr (Kawasan Tanpa Rokok) Terhadap Pencegahan Merokok Pada Remaja Di Sma Swasta Amal Bakti Medan. Prosiding Nasional Forikes 2022: Pembangunan Kesehatan Multidisiplin.
- Nurjanah, A., & Rosilawati, Y. (2021). Strategic Communication To Socialize Smoke Free Area In Klungkung, Bali, Indonesia): International Conference On Sustainable Innovation Track Humanities Education And Social Sciences (Icsiheess 2021), Bantul, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.211227.038>
- Pramana Putra, I. G. Y. E., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Thejournalish: Social